



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
www.sna13purwokerto.com

**IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KETERLAMBATAN
DALAM PENYUSUNAN APBD**

(Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010)

Oleh:

Chitra Ariesta Pandan Wangi

Irwan Taufiq Ritonga

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Abstract

Lateness of APBD preparation becomes a phenomenon in local government budgeting in Indonesia. The phenomenon is experienced by many local governments in Indonesia. Schedule of APBD preparation which is stated by regulations has not been applied yet by local governments. This phenomenon leads to retardation in regional economic growth. Based on the fact, it is need to solve this problem. The first step is to identify factors causing lateness of APBD preparation . The purpose of this research is to identify factors causing the phenomenon by using Local Government of Rejang Lebong as a sample. Process to identify these factors is Exploratory Factor Analysis (EFA). The result of this research showed that there are five factors causing lateness of APBD preparation. Those factors are (1) executive and legislative relationship factor, (2) educational background factor, (3) performance indicator factor, (4) commitment factor, and (5) arranger of APBD factor.

Keywords: lateness of APBD preparation, factor analysis, executive and legislative relationship, educational background, performance indicator, commitment,

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

arranger of APBD.

**IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KETERLAMBATAN
DALAM PENYUSUNAN APBD**

(Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010)

A. PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi di Indonesia telah bergulir selama lebih dari satu dasawarsa dan hal itu menandakan pula bahwa pelaksanaan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah juga telah lama dilakukan. Adanya otonomi menjadi salah satu bentuk perubahan dari adanya reformasi dalam bidang pemerintahan. Otonomi adalah bentuk dari hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengurus urusan terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara otonom sesuai dengan peraturan. Pengertian tersebut dinyatakan dalam UU 32/2004 dan memperlihatkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan daerah semakin besar bila dibandingkan di masa sebelum otonomi. Konsep otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan berpengaruh pula dalam penyelenggaraan anggaran daerah. Pada saat ini, anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD disusun secara mandiri oleh pemerintah daerah untuk menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah di wilayahnya masing-masing.

Menurut UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah secara

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

tahunan melalui pembahasan dan persetujuan antara DPRD dan pemerintah daerah dan kemudian disahkan dalam peraturan daerah. Penyusunan APBD oleh setiap daerah di Indonesia menjadi wujud penyelenggaraan otonomi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan anggaran. APBD setiap tahunnya disusun oleh pemerintah daerah dan untuk mendukung penyusunan APBD pemerintah pusat menerbitkan peraturan yang menjadi landasan dalam menyusun APBD. Salah satunya aturan yang diterbitkan tersebut adalah Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan aturan tersebut telah diuraikan jadwal dalam menyusun APBD yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Namun, adanya aturan yang berisikan jadwal tersebut belumlah mampu untuk mengatasi fenomena yang tengah terjadi dalam penyusunan APBD di Indonesia. Fenomena tersebut turut menggelitik perhatian karena fenomena ini terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Fenomena tersebut adalah terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD. Keterlambatan dalam penyusunan APBD ini telah terjadi dalam kurun waktu yang lama, bahkan di masa reformasi banyak pemerintah daerah yang masih terlambat dalam menyusun APBD. APBD yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan tersebut merupakan APBD yang terlambat ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD sebelum atau saat 31 Desember.

Menurut (KPK,2008) diketahui bahwa pada tahun 2005 dari 33 provinsi di Indonesia sebagian besar provinsi terlambat dalam mengesahkan APBD, yakni sebanyak 28 provinsi. Lalu sisanya sebanyak 5 provinsi mengesahkan APBD sesuai jadwal, yaitu tidak melebihi 31

Desember. Selain itu, diketahui pula keterlambatan dalam penyusunan APBD juga terjadi di tahun 2009. Berdasarkan data yang diperoleh dari (Seknas Fitra, 2010) dalam salah satu *website* diketahui bahwa penetapan perda APBD untuk tahun 2009 sebanyak 68,24% atau 348 daerah ditetapkan dalam kurun waktu 1 Januari – 31 Maret. Posisi kedua sebanyak 23,14% atau 118 daerah telah menetapkan APBD sesuai jadwal dan 44 daerah atau 8,63% menetapkan APBD melebihi 31 Maret. Informasi yang tersaji tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia mengalami keterlambatan dalam penyusunan APBD dengan ditandai terlambatnya penetapan perda APBD.

Keterlambatan penyusunan APBD telah melanda sebagian besar wilayah di Indonesia dan hal itu telah berlangsung pada kurun waktu yang lama bahkan hingga saat ini. Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu daerah yang tergolong mengalami keterlambatan dalam menyusun APBD khususnya APBD untuk tahun 2008-2010. APBD pada ketiga tahun anggaran tersebut disahkan pada kurun waktu antara 1 Januari – 31 Maret. Selain banyaknya daerah yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD, adanya keterlambatan APBD dapat memberikan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan APBD adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang umumnya sebagian besar pendanaan program tersebut berasal dari APBD. Program yang terlambat dilaksanakan dapat berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat.

APBD yang terlambat dalam proses penyusunannya dapat pula berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Hal tersebut terjadi karena ketika APBD terlambat ditetapkan melebihi 31 Desember, maka di masa APBD belum disahkan maka aliran dana dari sektor pemerintah akan

terhambat dan itu memberikan pengaruh pada aliran uang atau transaksi di daerah dan pada akhirnya perekonomian daerah turut merasakan dampak dengan adanya kelesuan ekonomi.

APBD yang terlambat disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD dapat pula memberi peluang munculnya korupsi, sebagaimana dinyatakan (KPK,2008). Peluang korupsi tersebut dapat muncul dikarenakan adanya usaha untuk mengalihkan dana yang tersisa dari pelaksanaan program APBD ke dalam rekening pribadi. Dana yang tersisa berasal dari dana sisa anggaran program yang tidak selesai dilakukan karena terlambat dalam pelaksanaan proses awal. Pengalihan dana ke rekening pribadi tersebut membuka peluang terjadi penyelewengan dana APBD untuk kepentingan pribadi sehingga terjadilah korupsi. Pada akhirnya dampak yang muncul dari keterlambatan penyusunan APBD tersebut merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hal-hal yang menjadi motivasi dalam penelitian ini adalah pertama, belum adanya penelitian yang terkait dengan keterlambatan dalam penyusunan APBD termasuk dalam hal ini di wilayah Rejang Lebong belum dilakukan penelitian tersebut. Kedua, keterlambatan dalam penyusunan APBD telah menjadi salah satu fenomena yang terjadi di sebagian besar wilayah pemerintah daerah Indonesia dan hingga saat ini fenomena tersebut terus terjadi setiap tahunnya. Ketiga, dampak yang timbulkan dari adanya keterlambatan APBD dapat pada akhirnya merugikan masyarakat selaku penerima layanan publik dan hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah yang selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Atas dasar itu, maka di pandang perlu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyusunan

APBD, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong. Setelah diidentifikasi faktor-faktor penyebab tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penyelesaian sekaligus pencegahan terjadinya keterlambatan penyusunan APBD.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Sampel dan Data Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan metode *purposive*. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Sampel dalam penelitian ini adalah Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan anggota Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Rejang Lebong.

Jenis data yang akan diolah dalam penelitian ini bersumber dari data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan sampel dari penelitian. Lalu data sekunder didapatkan melalui studi pustaka terhadap berbagai peraturan terkait serta media baca lainnya dan strategi arsip dari basis data BPS Rejang Lebong.

2. Metode Pengujian Instrumen

Pengujian instrumen dalam penelitian ini terbagi menjadi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk. Instrumen dikatakan valid bila nilai *correlated item-total correlation* lebih dari nilai r tabel, sebagaimana dinyatakan (Ghozali, 2009). Pengujian instrumen yang kedua, yakni uji

reliabilitas dilakukan dengan berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha*. Bila instrumen mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,50 ($> 0,50$) maka instrumen reliabel, menurut (Nunnaly, 1967) dalam (Jogiyanto,2008).

3. Metode Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan adalah analisis faktor jenis eksploratori atau dikenal dengan *exploratory factor analysis* (EFA). EFA berusaha untuk mengidentifikasi struktur dari faktor (sekumpulan variabel) yang terbentuk (Hair *et al.*, 1998). Pada penelitian ini tidak ada hipotesis karena belum ada penelitian dan teori sebelumnya. Tahapan dalam analisis faktor terdiri dari pertama menilai kelayakan untuk melakukan analisis faktor dengan berdasarkan nilai KMO yang harus memenuhi syarat nilai KMO di atas 0,50. Kedua melihat nilai kolerasi yang ditunjukkan variabel pada *anti- image correlation*. Variabel dengan nilai korelasi terkecil dan kurang dari 0,50 harus dikeluarkan dari analisis. (Hair *et al.*, 1998) menyatakan bahwa nilai $MSA < 0,50$ merupakan nilai yang tidak dapat diterima.

Ketiga, menentukan banyaknya faktor terbentuk. Pembentukan faktor didasarkan pada syarat, yakni apabila nilai *eigenvalue* > 1 maka akan terbentuk faktor. Tahapan keempat adalah menentukan distribusi dari variabel ke dalam faktor yang terbentuk berdasarkan pada *loading factor* pada *component matrix* dan *rotated component matrix*. Distribusi variabel telah tepat bila masing-masing variabel terdistribusi hanya ke dalam satu faktor saja. Kelima adalah pemberian nama faktor terhadap faktor yang telah terbentuk dan memiliki konstruk yang jelas.

C. ANALISIS DATA

1. Statistik Deskriptif

Kuesioner yang disebar dalam rangkaian pengumpulan data adalah sebanyak 69 eksemplar, tetapi jumlah yang kembali dan layak untuk diuji sebanyak 49 eksemplar. Kuesioner yang telah dikembalikan diperiksa untuk dibuat rekapitulasi identitas responden, berikut rekapitulasi terkait dengan identitas responden:

Tabel 1. Rekapitulasi Identitas Responden

Keterangan	Responden	Jumlah Responden
Jenis Kelamin	- Perempuan	14
	- Laki-laki	35
Umur (tahun)	- 21 – 25	1
	- 26 – 30	2
	- 31 – 35	1
	- Diatas 35	45
Golongan Kepangkatan	- Gol. III	25
	- Gol. IV	17
Tingkat Pendidikan	- SMA	11
	- D1/D2/D3	1
	- S1	18
	- S2	19

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

Pelatihan & Pendidikan	- Ya	21
Penganggaran Keuangan Daerah	- Tidak	28

Sumber: diolah dari data primer

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa sebagian besar pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD di wilayah Rejang Lebong tidak pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan terkait dengan penganggaran keuangan daerah. Hal tersebut menjadi catatan penting dalam menganalisis data.

2. Uji Validitas

Pengujian validitas memperlihatkan hasil bahwa ada beberapa variabel yang harus dikeluarkan dari proses analisis. Pada pengujian validitas diketahui $N = 49$, maka $df = n-2 = 47$ dan r tabel = 0,282. Apabila nilai r hitung dalam hal ini ditunjukkan dengan nilai *corrected item-total correlation* lebih kecil dari r tabel maka variabel tidak valid dan dikeluarkan dari proses analisis. Variabel yang dikeluarkan adalah V11 dengan r hitung 0,074, V15 dengan r hitung 0,005, dan V25 dengan r hitung 0,151.

3. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melibatkan 29 variabel dan didasarkan pada nilai *Cronbach's Alpha*. Hasil uji reliabilitas memperlihatkan bahwa 29 variabel tersebut mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,906. Variabel-variabel yang tersisa memperlihatkan memiliki

reliabilitas yang tinggi dan memenuhi syarat untuk dianalisis pada tahapan selanjutnya dengan analisis faktor.

4. Analisis Faktor

a. Menilai Kelayakan Analisis Faktor

Penilaian kelayakan variabel ditentukan dari nilai KMO yang diperoleh hasil pengolahan dengan SPSS *Statistic* 17.0. Nilai KMO yang diperoleh menunjukkan 0,707. Proses untuk mendapatkan nilai KMO tersebut dilakukan secara berulang untuk analisis faktor karena persyaratan untuk proses tidak dipenuhi sehingga ada beberapa variabel yang harus dikeluarkan. Pada tahapan akhir dari 29 variabel yang diujikan dengan analisis faktor hanya 15 variabel yang tersisa. Nilai KMO 0,707 lebih dari 0,50 ($> 0,50$) maka layak untuk dilakukan tahapan selanjutnya pada proses tersebut.

b. Menilai Nilai Korelasi Variabel

Nilai korelasi dari masing-masing variabel yang diwujudkan dalam nilai MSA (*Measures of Sampling Adequacy*) memperlihatkan tidak terdapat variabel dengan nilai korelasi terkecil kurang dari 0,50. Akibatnya nilai korelasi berada pada tingkatan diterima dan dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Berikut gambaran nilai korelasi variabel yang terdapat pada tampilan *Anti-Image Correlation*:

Tabel 2. Anti-image Matrices

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V9	V10	V13	V17	V19	V28	V30	V31
Anti-image	.707 ^a	-.235	-.475	.135	.016	-.372	.080	-.302	.046	.277	-.322	-.164	.220	-.070	.080
Correlation		.759 ^a	-.012	-.103	.176	.222	-.252	.077	-.115	-.267	-.117	-.206	.220	-.164	-.209
			.744 ^a	-.251	-.257	.168	-.093	.203	.034	-.122	-.070	.086	.057	.145	-.083
				.741 ^a	-.111	-.512	-.010	-.267	.043	.184	.091	-.199	-.219	-.283	.136
					.700 ^a	.063	-.432	.245	-.112	-.171	-.144	-.182	.150	-.188	.032
						.655 ^a	-.012	.115	-.238	-.159	-.220	.090	.093	.229	-.069
							.674 ^a	-.181	.024	.044	-.021	.280	-.171	.018	-.016
								.668 ^a	-.227	-.485	.137	-.158	.059	-.129	-.047
									.807 ^a	-.119	-.073	.042	.096	-.236	.173
										.548 ^a	-.059	.077	-.190	.150	.047
											.852 ^a	-.099	-.203	.076	-.001
												.717 ^a	-.467	.120	-.178
													.543 ^a	-.197	.036
														.688 ^a	-.400
															.681 ^a

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS *Statistic 17.0*

c. Pembentukan Faktor

Pembentukan faktor pada analisis faktor didasarkan pada nilai *eigenvalue*. Hasil pengolahan dengan SPSS *Statistic 17.0* memperlihatkan terdapat 5 faktor yang dapat dibentuk dari 15 variabel yang tersisa. Kelima faktor tersebut adalah faktor 1 dengan *eigenvalue*= 4,695; faktor 2 dengan *eigenvalue*= 2,111; faktor 3 dengan *eigenvalue*= 1,414; faktor 4 dengan *eigenvalue*= 1,325; dan terakhir faktor 5 dengan *eigenvalue*= 1,103.

d. Distribusi Variabel ke dalam Faktor-faktor

Distribusi variabel dilakukan setelah diketahui faktor-faktor yang terbentuk. Distribusi variabel dapat diketahui dengan melihat *component matrix*, tetapi apabila terdapat variabel yang belum jelas pendistribusiannya dalam *component matrix* maka digunakan *rotated component matrix* yang memperlihatkan hasil rotasi faktor terhadap variabel yang ada. Pada hasil yang ditunjukkan *component matrix* diketahui masih terdapat variabel dengan distribusi ke dalam

faktor yang belum jelas, yakni ada variabel-variabel yang mengelompok ke dalam lebih dari satu faktor. Variabel yang belum jelas distribusinya adalah V3, V30, dan V31.

Lalu selanjutnya dilakukan rotasi faktor dan diperoleh hasil pada tampilan *rotated component matrix*. Tampilan tersebut memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dibandingkan dengan tampilan *component matrix*. Berikut hasil yang ditunjukkan dari proses rotasi faktor:

Tabel 3. Rotated Component Matrix

	Component				
	1	2	3	4	5
V1	.864	.249	.098	.094	-.102
V2	.313	.641	.305	.187	-.027
V3	.684	.097	-.100	.434	-.063
V4	.502	.135	.281	.110	.581
V5	.296	.096	.022	.836	.097
V6	.773	-.203	.297	-.062	.131
V7	.050	.066	.203	.772	.093
V9	.120	.298	.762	-.056	.225
V10	.267	.117	.716	.137	-.067
V13	-.042	-.040	.756	.188	.129
V17	.744	.076	.061	.230	.145
V19	.325	.398	.077	-.033	.647
V20	.162	.525	.184	.550	-.198
V28	-.142	.054	.070	.072	.886
V30	-.054	.656	.223	.161	.353
V31	-.007	.801	-.067	.008	.171

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS *Statstic 17.0*

Rotasi faktor memperlihatkan distribusi masing-masing variabel yang terdiri dari:

- i. Variabel V1, V3, V6, dan V17 terdistribusi ke dalam faktor 1.
- ii. Variabel V9, V20, dan V13 terdistribusi ke dalam faktor 2.
- iii. Variabel V2, V30, dan V31 terkelompok ke dalam faktor 3.

- iv. Variabel V4, V19, dan V28 terdistribusi ke faktor 4.
- v. Variabel V5 dan V7 terdistribusi ke dalam faktor 5.

e. Struktur dan Penamaan Faktor

Tahapan sebelumnya telah menentukan masing-masing struktur dari tiap faktor yang terbentuk. Selanjutnya dari tiap faktor yang telah berisi variabel dilakukan pemberian nama terhadap faktor tersebut. Penamaan faktor dilakukan dengan memberikan nama faktor yang dapat mewakili variabel-variabel yang terkandung dalam faktor tersebut. Secara jelas struktur dan nama faktor yang terbentuk tampak dalam tabel berikut:

Tabel 4. Nama Faktor

Faktor	Eigenvalue	Variabel-variabel	Loading Factor	Nama Faktor
1	4,695	- Komunikasi eksekutif & legislatif tidak efektif	0,876	Hubungan Eksekutif dan Legislatif
		- Kesenjangan informasi antara eksekutif & legislatif	0,755	
		- Koordinasi antara eksekutif & legislatif belum baik	0,749	
		- Eksekutif & legislatif belum mampu bekerja sama	0,686	
2	2,111	- SKPD minim dengan latar belakang pendidikan terkait penganggaran	0,762	Latar Belakang Pendidikan
		- Banggar minim dengan latar belakang pendidikan terkait penganggaran daerah	0,760	
		- TAPD minim dengan latar belakang pendidikan terkait penganggaran daerah	0,715	
3	1,414	- Kesulitan menerjemahkan indikator kinerja dalam APBD	0,834	Indikator Kinerja
		- Kurangnya informasi pemda dalam menentukan indikator kinerja pada APBD	0,693	
		- Komunikasi antar anggota SKPD dalam menyusun APBD tidak efektif	0,655	

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

4	1,325	- Belum ada kemauan kuat untuk menerapkan anggaran partisipatif	0,895	Komitmen
		- SKPD belum memahami visi, misi, sasaran, & tujuan dari penyusunan APBD	0,703	
		- Pihak eksekutif lebih mengutamakan kepentingan eksekutif dalam penyusunan APBD	0,543	
5	1,103	- Minimnya pelatihan & pendidikan yang diikuti SKPD terkait penganggaran	0,818	Penyusun APBD
		- Pihak legislatif lebih mengutamakan kepentingan legislatif dalam penyusunan APBD	0,798	

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS *Statistic 17.0*

5. Pembahasan Faktor

a. Faktor Hubungan Eksekutif dan Legislatif

Tahapan penyusunan APBD diwarnai dengan hubungan yang tercipta antara eksekutif dan legislatif karena dalam penyusunan APBD kedua pihak tersebut berperan dan menunjukkan kesepakatan maupun kerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hubungan yang baik dan selaras dapat mendorong penyusunan APBD yang efektif dan efisien. Namun, bila sebaliknya hubungan APBD tidak berjalan dengan baik dapat berpengaruh buruk pada penyusunan APBD. Salah satu bentuk hubungan yang berpengaruh pada penyusunan APBD adalah hubungan keagenan.

Hubungan keagenan memperlihatkan adanya prinsipal dan agen serta terjadinya pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang memiliki empat ciri sebagaimana dinyatakan oleh Lupia dan McCubbins (2000) dalam Halim dan Abdullah (2006), yakni terjadi informasi asimetrik, adanya prinsipal maupun agen, timbul konflik kepentingan, dan adanya usaha prinsipal untuk mengurangi masalah keagenan. Ciri-ciri pada pendelegasian tersebut

secara tidak langsung dapat menjadi ciri dari hubungan keagenan yang terjadi antar eksekutif dan legislatif serta dapat ditemukan dalam penyusunan APBD. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa hubungan eksekutif dan legislatif yang tidak selaras dan lebih mengarah pada keagenan merupakan salah satu faktor penyebab keterlambatan dalam penyusunan APBD. Hubungan tersebut menghambat proses penyusunan APBD yang efektif dan efisien. Item-item pertanyaan dari faktor hubungan eksekutif dan legislatif terdiri dari (1) komunikasi eksekutif dan legislatif tidak efektif, (2) kesenjangan informasi antara eksekutif dan legislatif, (3) koordinasi antar eksekutif dan legislatif belum baik, dan (4) eksekutif dan legislatif belum mampu bekerja sama.

b. Faktor Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan menunjukkan kemampuan dan bidang ilmu yang dikuasai oleh seseorang selama menempuh jalur pendidikan formal. Bidang ilmu yang dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD hendaknya sejalan dengan kegiatan penganggaran. Oleh karena itu, anggota dari organisasi sektor publik khususnya yang terlibat dalam penyusunan APBD hendaknya memiliki dasar ilmu yang berkaitan dengan sistem penyusunan anggaran. Selain itu latar belakang pendidikan memperlihatkan pula kompetensi dan pemahaman yang dimiliki sumber daya manusia dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Penempatan pegawai secara tepat sesuai dengan bidang ilmu dan pendidikan yang dimiliki dapat menjadi salah satu cara untuk melibatkan pihak yang memiliki kompetensi terkait penganggaran dalam penyusunan APBD. Hasil analisis faktor menunjukkan latar belakang pendidikan sebagai wujud kompetensi apabila tidak memiliki kesesuaian dengan kegiatan

penganggaran dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan APBD. Hal itu berkaitan dengan penempatan pihak yang kurang berkompeten dalam penyusunan APBD sehingga proses penyusunan APBD dapat terhambat. Item-item pertanyaan yang terkait dengan faktor latar belakang pendidikan adalah (1) SKPD minim dengan anggota yang mempunyai latar belakang pendidikan terkait penganggaran, (2) Banggar DPRD minim dengan anggota yang memiliki latar belakang pendidikan terkait penganggaran keuangan daerah, dan (3) anggota TAPD minim dengan latar belakang pendidikan terkait penganggaran daerah.

c. Faktor Indikator Kinerja

Salah satu instrumen penting dalam APBD adalah indikator kinerja. Indikator kinerja menunjukkan tingkat yang dicapai dari pelaksanaan program dan kebijaksanaan untuk mewujudkan visi, misi, sasaran, tujuan dari organisasi sektor publik, sebagaimana dinyatakan BPKP (2005). Indikator kinerja memiliki peran penting karena indikator ini berguna dalam penentuan kinerja yang dicapai dari pelaksanaan APBD dan perlu diingat pula bahwa APBD disusun dengan berbasiskan pada kinerja. Indikator kinerja terdiri dari input, output, efisiensi, kualitas, dan *outcome*. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja yang tepat adalah standar pelayanan minimum, ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan, kelanjutan program, tingkat inflasi, tingkat efisiensi, kendala di masa akan datang, dan dasar untuk menetapkan prioritas anggaran.

Selain faktor-faktor di atas dalam menentukan indikator kinerja terdapat kriteria yang harus dipenuhi. BPKP (2005) menyatakan bahwa indikator kinerja harus memenuhi kriteria yang terdiri dari spesifik, dapat diukur, relevan, dan tidak bias. Penentuan indikator kinerja dalam

penyusunan APBD bukanlah hal yang mudah. Tahapan penentuan indikator kinerja merupakan proses kompleks dan harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Tanpa adanya fasilitas dan sarana yang memadai maka penentuan indikator kinerja dapat menjadi sulit dan membutuhkan waktu yang lama yang berpengaruh pada ketepatan waktu APBD untuk ditetapkan. Faktor indikator kinerja terdiri dari item pertanyaan (1) kesulitan menerjemahkan indikator kinerja dalam APBD, (2) kurangnya informasi yang dimiliki terkait penentuan indikator kinerja, dan (3) komunikasi antar anggota SKPD dalam penyusunan APBD tidak efektif.

d. Faktor Komitmen

Komitmen adalah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak di dalam organisasi untuk secara bersama melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dalam rangka mewujudkan visi, misi, sasaran, dan tujuan dari organisasi. Pada penyusunan APBD pihak-pihak yang terlibat hendaknya memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan penyusunan APBD secara tepat waktu serta melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Adanya komitmen memberikan gambaran bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD untuk mengetahui secara jelas visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan APBD. Selain itu, melalui komitmen dapat menciptakan motivasi dan kemauan bagi pihak penyusun APBD untuk menyelenggarakan tahapan penyusunan APBD yang lebih baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Item pertanyaan yang menunjukkan bahwa faktor komitmen yang tidak memadai dapat menjadi penyebab keterlambatan penyusunan APBD adalah (1) belum ada kemauan kuat menerapkan anggaran partisipatif, (2) SKPD belum memahami visi, misi, sasaran, dan tujuan

dari penyusunan APBD, dan (3) pihak eksekutif lebih mengutamakan kepentingan eksekutif dalam penyusunan APBD.

e. Faktor Penyusun APBD

Penyusun APBD merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penyusunan APBD, baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif. Penyusun APBD dari kedua pihak tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Badan Anggaran (Banggar). SKPD dan TAPD berasal dari pihak eksekutif sedang Banggar merupakan bagian dari legislatif. Pihak yang berperan dan terlibat langsung dalam penyusunan APBD dapat berpengaruh terhadap penyusunan APBD, termasuk dalam kaitannya dengan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD. Berbagai bentuk perilaku dan aktivitas serta kemampuan pihak penyusun APBD yang tidak sesuai dan bersinergi dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD.

Pada penelitian ini diketahui bahwa item pertanyaan yang berkaitan dengan faktor penyusun APBD adalah (1) minimnya pelatihan dan pendidikan terkait penganggaran yang diikuti oleh SKPD dan (2) pihak legislatif lebih mengutamakan kepentingan legislatif dalam penyusunan APBD. Item pertanyaan (1) menunjukkan kemampuan yang dimiliki SKPD yang dapat diperoleh pada pendidikan informal. Bila melihat penggolongan variabel lainnya, item pertanyaan ini dapat dikaitkan dengan dengan faktor latar belakang pendidikan karena keduanya berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia. Namun, analisis faktor menggolongkan item pertanyaan (1) ke dalam faktor yang terpisah dari faktor latar belakang

pendidikan. Pemisahan tersebut dikarenakan faktor latar belakang pendidikan berisi variabel yang terkait dengan pendidikan formal sedang untuk item pertanyaan (1) merupakan bentuk dari pendidikan informal. Penelitian ini melalui analisis faktor secara jelas memisahkan faktor yang terkait pendidikan formal dan informal.

Item pertanyaan (2) bila dianalisis secara keseluruhan memiliki kaitan dan dapat terdistribusi ke dalam faktor komitmen. Namun hasil analisis faktor memperlihatkan item tersebut tergolong ke dalam faktor yang terpisah dengan ditandai korelasi yang tinggi dari item pertanyaan (2) terhadap faktor penyusun APBD. Pemisahan tersebut bila dianalisis lebih lanjut dapat disebabkan dari jawaban yang diberikan responden. Analisis memperlihatkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban netral (skala likert 3) bagi item pertanyaan (2) di urutan pertama yang menyebabkan item pertanyaan tersebut sulit untuk digolongkan ke dalam faktor komitmen karena sebagian besar responden tidak dapat secara jelas menentukan item tersebut dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan APBD atau tidak. Akibat kesulitan tersebut item pertanyaan (2) terdistribusi ke dalam faktor yang baru mengingat jawaban kedua terbanyak yang diberikan responden adalah setuju dengan item pertanyaan (2).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian telah mengidentifikasi terdapat 5 faktor yang merupakan faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD. Kelima faktor tersebut terdiri dari faktor

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

hubungan eksekutif dan legislatif; faktor latar belakang pendidikan; faktor indikator kinerja; faktor komitmen; dan faktor penyusun APBD. Kelima faktor tersebut memiliki total persentase varian sebesar 70,983%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut secara keseluruhan memberikan pengaruhnya terhadap keterlambatan penyusunan APBD sebesar 70,983% dan sisanya 29,017% dipengaruhi oleh faktor lainnya selain dari kelima faktor tersebut. Konstruksi secara rinci dari masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Struktur dan Nama Faktor

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

Faktor	Eigenvalue	Variabel-variabel	Loading Factor	Nama Faktor
1	4,695	- Komunikasi eksekutif & legislatif tidak efektif	0,876	Hubungan Eksekutif dan Legislatif
		- Kesenjangan informasi antara eksekutif & legislatif	0,755	
		- Koordinasi antara eksekutif & legislatif belum baik	0,749	
		- Eksekutif & legislatif belum mampu bekerja sama	0,686	
2	2,111	- SKPD minim dengan latar belakang pendidikan terkait penganggaran	0,762	Latar Belakang Pendidikan
		- Banggar minim dengan latar belakang pendidikan terkait penganggaran daerah	0,760	
		- TAPD minim dengan latar belakang pendidikan terkait penganggaran daerah	0,715	
3	1,414	- Kesulitan menerjemahkan indikator kinerja dalam APBD	0,834	Indikator Kinerja
		- Kurangnya informasi pemda dalam menentukan indikator kinerja pada APBD	0,693	
		- Komunikasi antar anggota SKPD dalam menyusun APBD tidak efektif	0,655	
4	1,325	- Belum ada kemauan kuat untuk menerapkan anggaran partisipatif	0,895	Komitmen
		- SKPD belum memahami visi, misi, sasaran, & tujuan dari penyusunan APBD	0,703	
		- Pihak eksekutif lebih mengutamakan kepentingan eksekutif dalam penyusunan APBD	0,543	
5	1,103	- Minimnya pelatihan & pendidikan yang diikuti SKPD terkait penganggaran	0,818	Penyusun APBD
		- Pihak legislatif lebih mengutamakan kepentingan legislatif dalam penyusunan APBD	0,798	

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS Statistic 17.0

2. Saran

Kesimpulan yang diperoleh tersebut memberikan implikasi bagi penyusunan APBD terutama dalam kaitannya untuk mengatasi keterlambatan penyusunan APBD di wilayah Rejang Lebong secara khusus. Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahapan penyusunan APBD selanjutnya membina hubungan yang harmonis dan bersinergi antara eksekutif maupun legislatif perlu dilakukan secara mendalam dan

menyeluruh. Kedua belah pihak tersebut harus memahami tujuan dari penyusunan APBD bagi pelaksanaan pemerintahan dan setiap unsur yang terlibat haruslah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam penyusunan APBD.

- b. Kompetensi dan keahlian SDM harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD dan dalam kegiatan lainnya. Penempatan pegawai hendaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa pihak yang bertugas tersebut memiliki keahlian dan kompetensi terkait dengan tugas dan kegiatan yang harus dilakukan tersebut dengan tujuan pelaksanaan yang efektif dan efisien. Selain itu, dalam proses perekrutan pegawai pendidikan dan keahlian juga turut menjadi faktor utama syarat penerimaan pegawai agar pegawai baru yang diterima sesuai dengan kebutuhan yang diterima organisasi sektor publik.
- c. Selain berdasarkan pada pendidikan formal yang sesuai dengan tugas dan kegiatan yang dilakukan, saran lainnya adalah perlunya peran pendidikan informal ditingkatkan lagi sehubungan dengan pelaksanaan penganggaran daerah. Salah satu bentuk peningkatan peran pendidikan informal adalah pemerintah daerah dapat secara mandiri menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan penganggaran keuangan daerah. Adanya hal tersebut dapat menambah kompetensi dan keahlian pihak yang telah berlatar pendidikan terkait penganggaran keuangan daerah serta memberikan tambahan ilmu baru bagi pihak yang belum berkompeten dalam hal tersebut.
- d. Faktor-faktor yang telah teridentifikasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak eksekutif maupun legislatif untuk merancang solusi penyelesaian terhadap permasalahan keterlambatan penyusunan APBD di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Budget-Info. 25 Juni 2010. 13 Maret 2010 <www.budget-info.com>.
- BPKP. "Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)." 28 Juni 2010. Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan. 9 April 2010 <http://www.bpkp.go.id>.
- Cooper, Donald R. & Pamela S. Schindler. Business Research Method. New York: McGraw-Hill, 2001.
- Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Hair, et.al. Multivariate Data Analysis. New Jersey: Prentice-Hall, 1998.
- Halim, Abdul & Syukri Abdulah. "Hubungan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran & Akuntansi." Jurnal Akuntansi Pemerintah (2006): 53-64.
- Jogiyanto. Pedoman Survei Kuesioner: Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2008.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Konteks Pencegahan Korupsi. Jakarta: KPK, Maret 2008.
- Republik Indonesia. Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006.
- . Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. 2004.

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

- . Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2004.

LAMPIRAN

Permohonan Kesediaan Menjadi Responden

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Saudara Responden

Di Tempat

Dengan hormat

Sehubungan dengan penulisan skripsi yang sedang saya kerjakan saat ini, saya mahasiswa S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Program Studi Akuntansi:

Nama : Chitra Ariesta Pandan Wangi

NIM : 06/192764/EK/16151

melakukan penelitian ilmiah. Berdasarkan penelitian tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan menjadi responden. Penelitian yang saya lakukan ini mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD.

Pada penelitian ini pihak yang menjadi responden harus memenuhi syarat, yakni pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan APBD. Partisipasi yang diberikan Bapak/Ibu/Saudara dalam pengisian kuesioner ini sangat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keberhasilan penelitian yang saya lakukan. Selain itu, jawaban yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Saudara akan terjamin kerahasiaannya.

Atas waktu, perhatian, dan kesediaan yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Saudara dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, April 2010

Chitra Ariesta Pandan Wangi

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

Setujukah Anda dengan hal-hal di bawah ini memberikan pengaruh terhadap keterlambatan dalam penyusunan APBD?

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Komunikasi yang terjalin di antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD kurang harmonis	1	2	3	4	5
2.	Komunikasi antar anggota SKPD dalam penyusunan APBD tidak berjalan secara efektif	1	2	3	4	5
3.	Pihak eksekutif dan legislatif kurang mampu bekerja sama dengan baik dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
4.	Pihak Eksekutif lebih mengutamakan kepentingan eksekutif dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
5.	Pihak Legislatif lebih mengutamakan kepentingan legislatif dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
6.	Adanya kesenjangan informasi yang dimiliki antar pihak eksekutif dengan legislatif	1	2	3	4	5
7.	Minimnya pelatihan dan pendidikan terkait penganggaran keuangan daerah yang diikuti tim penyusun anggaran SKPD	1	2	3	4	5
8.	SKPD kurang memahami secara jelas peraturan perundangan terkait dengan penyusunan APBD	1	2	3	4	5
9.	Minimnya anggota SKPD dengan latar belakang pendidikan yang terkait dengan penyusunan anggaran	1	2	3	4	5
10.	Minimnya anggota dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi	1	2	3	4	5
11.	Kurangnya pelatihan dan pendidikan penganggaran keuangan daerah yang diikuti oleh anggota-anggota dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1	2	3	4	5
12.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah belum mengetahui dan memahami secara jelas peraturan perundangan yang menjadi landasan dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
13.	Minimnya anggota dari Badan Anggaran yang memiliki latar belakang pendidikan terkait penyusunan anggaran	1	2	3	4	5
14.	Badan Anggaran belum mengetahui dan memahami secara jelas peraturan perundangan yang melandasi penyusunan APBD	1	2	3	4	5
15.	Kurangnya pelatihan penganggaran keuangan daerah yang diikuti oleh Badan Anggaran	1	2	3	4	5
16.	SKPD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah belum mampu menjalankan koordinasi secara efektif dan efisien dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
17.	Pihak eksekutif dan legislatif belum mampu berkoordinasi secara baik dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
18.	Pembagian atau pendelegasian tugas antar anggota di tiap SKPD yang terlibat dalam penyusunan APBD belum jelas	1	2	3	4	5
19.	Unsur SKPD kurang memahami secara jelas visi, misi, sasaran, dan tujuan dari penyusunan APBD	1	2	3	4	5
20.	Pihak Eksekutif dan Legislatif belum sepakat dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
21.	Adanya perubahan peraturan perundangan yang menjadi pedoman penyusunan APBD	1	2	3	4	5
22.	Belum diterapkan secara maksimal Standar Pelayanan Minimal dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
23.	Standar Harga Barang dan Jasa belum memadai	1	2	3	4	5
24.	Masih belum memiliki Analisis Standar Belanja yang jelas	1	2	3	4	5
25.	Terjadinya keterlambatan penyampaian informasi oleh pemerintah pusat yang diperlukan dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
26.	Tahapan perencanaan yang terlambat dilaksanakan	1	2	3	4	5
27.	Masih besarnya peran faktor politis dalam penyusunan dan penetapan APBD	1	2	3	4	5

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

28.	Belum adanya kemauan yang kuat untuk menerapkan penganggaran secara partisipatif	1	2	3	4	5
29.	Penentuan tolok ukur jangka panjang maupun jangka pendek yang belum memadai dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
30.	Kurangnya informasi yang dimiliki pemerintah daerah untuk menentukan indikator kinerja yang diperlukan dalam APBD	1	2	3	4	5
31.	Adanya kesulitan untuk menterjemahkan indikator kinerja ke dalam elemen anggaran	1	2	3	4	5
32.	Pemerintah Daerah sulit mengukur dan menentukan capaian kinerja yang dituju dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5

Curup, April 2010

()

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
V1	107.43	230.292	.473	.840	.891
V2	107.82	224.028	.665	.815	.888
V3	107.71	229.292	.398	.819	.893
V4	108.00	225.750	.530	.925	.890
V5	107.84	226.681	.518	.837	.890
V6	107.27	236.616	.288	.908	.894
V7	106.96	235.707	.441	.694	.892
V8	107.92	221.910	.623	.859	.888
V9	107.39	230.326	.490	.795	.891
V10	107.14	230.083	.489	.745	.891
V11	107.31	241.925	.074	.868	.898
V12	108.33	226.891	.569	.746	.889
V13	107.33	230.808	.435	.673	.892
V14	108.16	232.389	.382	.885	.893
V15	107.55	243.878	.005	.879	.900
V16	107.63	223.362	.674	.932	.887
V17	107.39	231.867	.474	.843	.891
V18	108.22	226.886	.541	.816	.890
V19	108.04	223.790	.568	.889	.889
V20	107.80	228.291	.504	.792	.891
V21	107.22	238.011	.310	.690	.894
V22	107.37	231.946	.392	.782	.893
V23	107.94	232.225	.316	.768	.895

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

V24	107.78	231.719	.381	.698	.893
V25	107.71	239.083	.151	.836	.897
V26	107.71	223.958	.552	.723	.890
V27	106.96	235.707	.329	.888	.894
V28	107.39	235.201	.297	.836	.894
V29	107.65	227.773	.579	.756	.889
V30	108.02	230.187	.476	.829	.891
V31	107.90	231.802	.399	.811	.893
V32	107.92	224.993	.560	.868	.889

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.906	.906	29

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.707
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	271.764
	df	105
	Sig.	.000

Anti-image Matrices

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V9	V10	V13	V17	V19	V28	V30	V31	
Anti-image Correlation	V1	.707 ^a	-.235	-.475	.135	.016	-.372	.080	-.302	.046	.277	-.322	-.164	.220	-.070	.080
	V2	-.235	.759 ^a	-.012	-.103	.176	.222	-.252	.077	-.115	-.267	-.117	-.206	.220	-.164	-.209
	V3	-.475	-.012	.744 ^a	-.251	-.257	.168	-.093	.203	.034	-.122	-.070	.086	.057	.145	-.083
	V4	.135	-.103	-.251	.741 ^a	-.111	-.512	-.010	-.267	.043	.184	.091	-.199	-.219	-.283	.136
	V5	.016	.176	-.257	-.111	.700 ^a	.063	-.432	.245	-.112	-.171	-.144	-.182	.150	-.188	.032
	V6	-.372	.222	.168	-.512	.063	.655 ^a	-.012	.115	-.238	-.159	-.220	.090	.093	.229	-.069
	V7	.080	-.252	-.093	-.010	-.432	-.012	.674 ^a	-.181	.024	.044	-.021	.280	-.171	.018	-.016
	V9	-.302	.077	.203	-.267	.245	.115	-.181	.668 ^a	-.227	-.485	.137	-.158	.059	-.129	-.047
	V10	.046	-.115	.034	.043	-.112	-.238	.024	-.227	.807 ^a	-.119	-.073	.042	.096	-.236	.173
	V13	.277	-.267	-.122	.184	-.171	-.159	.044	-.485	-.119	.548 ^a	-.059	.077	-.190	.150	.047
	V17	-.322	-.117	-.070	.091	-.144	-.220	-.021	.137	-.073	-.059	.852 ^a	-.099	-.203	.076	-.001
	V19	-.164	-.206	.086	-.199	-.182	.090	.280	-.158	.042	.077	-.099	.717 ^a	-.467	.120	-.178
	V28	.220	.220	.057	-.219	.150	.093	-.171	.059	.096	-.190	-.203	-.467	.543 ^a	-.197	.036
	V30	-.070	-.164	.145	-.283	-.188	.229	.018	-.129	-.236	.150	.076	.120	-.197	.688 ^a	-.400
	V31	.080	-.209	-.083	.136	.032	-.069	-.016	-.047	.173	.047	-.001	-.178	.036	-.400	.681 ^a

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	Variance	%	Total	Variance	%	Total	Variance	%
1	4.695	31.297	31.297	4.695	31.297	31.297	3.045	20.298	20.298
2	2.111	14.073	45.370	2.111	14.073	45.370	2.078	13.851	34.149
3	1.414	9.430	54.800	1.414	9.430	54.800	1.970	13.133	47.282
4	1.325	8.832	63.632	1.325	8.832	63.632	1.845	12.299	59.581
5	1.103	7.351	70.983	1.103	7.351	70.983	1.710	11.403	70.983
6	.849	5.661	76.644						
7	.603	4.021	80.665						
8	.552	3.678	84.344						
9	.531	3.541	87.885						
10	.421	2.804	90.689						
11	.413	2.753	93.442						
12	.368	2.450	95.893						
13	.255	1.701	97.593						
14	.210	1.398	98.991						
15	.151	1.009	100.000						

Component Matrix 2

	Component				
	1	2	3	4	5
V1	.692	-.485	.026	-.195	-.281
V2	.656	.112	.173	.207	-.389
V3	.579	-.536	.280	.029	.036
V4	.738	.113	-.082	-.266	.172
V5	.563	-.241	.321	.308	.427
V6	.567	-.415	-.375	-.282	.004
V7	.473	-.045	.237	.573	.360
V9	.575	.394	-.451	.121	-.176
V10	.548	.014	-.462	.276	-.128
V13	.398	.248	-.500	.380	.125
V17	.662	-.385	.032	-.228	.061
V19	.592	.352	.093	-.493	.081
V28	.275	.606	.024	-.354	.522
V30	.509	.542	.270	.119	-.151
V31	.357	.426	.498	.002	-.401

Rotated Component Matrix 2

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

	Component				
	1	2	3	4	5
V1	.876	.098	.214	-.075	.063
V2	.329	.308	.655	-.050	.181
V3	.686	-.093	.118	-.088	.449
V4	.483	.292	.172	.543	.147
V5	.315	.028	.068	.118	.798
V6	.755	.301	-.193	.119	-.041
V7	.044	.218	.146	.007	.818
V9	.123	.762	.286	.229	-.075
V10	.279	.715	.087	-.044	.099
V13	-.046	.760	-.024	.110	.196
V17	.749	.064	.046	.173	.214
V19	.332	.077	.343	.703	-.066
V28	-.157	.076	.052	.895	.085
V30	-.049	.229	.693	.311	.175
V31	.004	-.064	.834	.133	.020